

EVALUASI STRATEGI KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA.

Fahrudin, Titi Kadi²

¹ Pascasarjana UINSI Samarinda

²UINSI Samarinda

¹samarindafahri@gmail.com, ² titikadi.ibrahim112@gmail.com,

ABSTRACT

This research aims to conduct an in-depth evaluation of the policy strategies implemented by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in improving the accessibility and quality of madrasah education. The main problems identified include quality disparities between regions, limitations of digital infrastructure in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) areas, and structural obstacles due to the dualism of the national education system that causes madrasas to often be considered second-class educational institutions. The importance of this research lies in the need for strategic recommendations to support the vision of a Golden Indonesia 2045 through the strengthening of intellectually and spiritually superior human resources. The methodology used is a qualitative approach with literature study methods and document analysis on the latest regulations, including the Ministry of Religion's Strategic Plan 2025-2029 and the Madrasah Education Quality Reform (MEQR) program. The results of the study show that the implementation of the e-RKAM system, the Indonesian Madrasah Competency Assessment (AKMI), and affirmative policies in the Admission of New Students (PPDB) have significantly increased governance transparency and expanded access for marginalized groups. However, the effectiveness of the policy is still constrained by the low digital literacy of educators and the inequality of technological support facilities. These findings underscore the importance of multi-sector collaboration and locally-context-based policy personalization to ensure the sustainability of the quality of Islamic education in Indonesia.

Keywords: *Madrasah Policy, Access to Education, Quality of Education, Madrasah Reform, Digital Transformation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan madrasah. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi disparitas mutu antarwilayah, keterbatasan infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta hambatan struktural akibat dualisme sistem pendidikan nasional yang menyebabkan madrasah seringkali dianggap sebagai institusi pendidikan kelas dua. Kepentingan penelitian

ini terletak pada perlunya rekomendasi strategis guna mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan sumber daya manusia yang unggul secara intelektual dan spiritual. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen terhadap regulasi terbaru, termasuk Rencana Strategis Kementerian Agama 2025-2029 dan program Madrasah Education Quality Reform (MEQR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-RKAM, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI), dan kebijakan afirmatif dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah secara signifikan meningkatkan transparansi tata kelola dan perluasan akses bagi kelompok marjinal. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh rendahnya literasi digital pendidik dan ketimpangan sarana pendukung teknologi. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor dan personalisasi kebijakan berbasis konteks lokal untuk menjamin keberlanjutan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Madrasah, Akses Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Madrasah Reform, Transformasi Digital.

A. Pendahuluan

Pendidikan madrasah di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga pendidikan umum yang berciri khas agama Islam, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai wadah transfer ilmu pengetahuan umum, tetapi juga sebagai benteng moral dan karakter bagi generasi muda. Namun, secara faktual, madrasah seringkali dihadapkan pada tantangan sosio-religius dan ekonomi yang kompleks. Data menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah di Indonesia berstatus swasta, yang

secara finansial sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan bantuan pemerintah. Kondisi ini menciptakan kesenjangan mutu yang lebar antara madrasah negeri yang didanai penuh oleh negara dengan madrasah swasta di pelosok desa yang seringkali memiliki sarana prasarana di bawah standar minimal. Secara politik dan ekonomi, kebijakan pendidikan madrasah dipengaruhi oleh dinamika dualisme sistem pendidikan yang memisahkan otoritas pengelolaan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Kementerian Agama. Dualisme ini telah berlangsung sejak zaman kolonial dan terus berdampak pada perbedaan

alokasi sumber daya serta persepsi publik terhadap kualitas lulusan. Meskipun secara legal-formal melalui UU No. 20 Tahun 2003 madrasah telah diakui setara dengan sekolah umum, namun dalam tataran praktis, lulusan madrasah masih sering dianggap kurang kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan umum dan teknologi dibandingkan rekan mereka dari sekolah umum. Fakta lingkungan juga menunjukkan bahwa madrasah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mengalami hambatan serius dalam mengakses infrastruktur dasar seperti listrik dan internet, yang menjadi penghalang utama bagi transformasi digital yang dicanangkan pemerintah.

Fakta literatur menunjukkan bahwa upaya reformasi madrasah telah dilakukan melalui berbagai skema, yang terbaru dan paling progresif adalah program Realizing Education's Promise - Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR). Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam manajemen madrasah, seperti e-RKAM dan EMIS, mampu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Namun, terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana kebijakan afirmatif dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berinteraksi dengan peningkatan mutu lulusan di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian (VUCA - Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity). Ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi apakah intervensi kebijakan saat ini sudah cukup untuk menutup celah kesenjangan antara tuntutan kualitas global dengan realitas di lapangan.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas strategi kebijakan Kementerian Agama dalam meningkatkan akses dan kualitas madrasah di Indonesia, dengan fokus pada program reformasi tata kelola, kebijakan afirmatif, dan transformasi digital. Analisis akan diarahkan untuk memahami mekanisme implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan serta mengidentifikasi faktor penghambat yang bersifat sistemik dan kultural. Tulisan ini berargumen bahwa peningkatan mutu madrasah tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknokratis semata, melainkan memerlukan harmonisasi antara penguatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem

manajemen, dan kebijakan afirmatif yang berorientasi pada keadilan sosial. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa keberhasilan reformasi madrasah sangat bergantung pada integrasi sistem data yang akurat dan transparansi pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang didukung oleh kesiapan budaya mutu di tingkat madrasah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Pilihan objek penelitian difokuskan pada kebijakan strategis Kementerian Agama Republik Indonesia periode 2020-2024 dan proyeksi 2025-2029 terkait pendidikan madrasah. Kasus-kasus spesifik yang dianalisis meliputi implementasi program REP-MEQR, kebijakan PPDB, dan pengelolaan dana BOS di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk wilayah 3T.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Data diperoleh dari dokumen regulasi seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama, buku statistik

APK/APM, serta artikel jurnal ilmiah yang mendokumentasikan hasil evaluasi program di lapangan. Partisipan dalam konteks ini adalah sumber informasi dari dokumen-dokumen resmi dan laporan penelitian yang mencakup pandangan kepala madrasah, guru, dan pengelola kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap: (1) Identifikasi dan pengumpulan dokumen kebijakan serta literatur relevan; (2) Kategorisasi data berdasarkan tema akses, kualitas, dan tata kelola; (3) Analisis isi untuk mengekstraksi strategi dan dampak kebijakan; serta (4) Sintesis hasil analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kebijakan yang mencakup pengkajian metodologi, implementasi, dan evaluasi dampak untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas strategi kebijakan yang telah dijalankan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Eformasi Tata Kelola: Program REP-MEQR dan Sistem e-RKAM

Implementasi program Realizing Education's Promise - Madrasah

Education Quality Reform (REP-MEQR) merupakan langkah revolusioner dalam memperbaiki sistem manajemen pendidikan Islam di Indonesia. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Agama dengan Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan pendidikan di seluruh madrasah. Fokus utama dari reformasi ini adalah digitalisasi proses perencanaan dan penganggaran melalui sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik).

Eksplanasi data menunjukkan bahwa sistem e-RKAM telah berhasil mendorong madrasah untuk melakukan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) sebelum menyusun anggaran. Hal ini memastikan bahwa penggunaan dana BOS benar-benar didasarkan pada kebutuhan prioritas untuk peningkatan mutu. Relasi data mengungkapkan bahwa madrasah yang secara konsisten menggunakan e-RKAM menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan yang lebih tinggi dan lebih responsif terhadap rekomendasi perbaikan dari tim penjamin mutu. Namun, tantangan subjektivitas dalam pengisian EDM masih ditemukan, yang terkadang mempengaruhi akurasi hasil penilaian skor kinerja madrasah.

2. Kebijakan Akses: PPDB Afirmatif dan Dampak Dana BOS

Kebijakan peningkatan akses madrasah diformalkan melalui

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunnya diperbarui untuk menjamin asas keadilan. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 64 Tahun 2025, madrasah diwajibkan untuk memberikan ruang bagi kelompok yang kurang beruntung melalui jalur afirmasi. Eksplanasi data dari berbagai studi literatur menunjukkan bahwa dana BOS memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan operasional madrasah tanpa harus membebani orang tua secara berlebihan. Di wilayah dengan indeks kemiskinan tinggi, BOS berkontribusi pada peningkatan APK sebesar 7,2% di tingkat SMP/MTs dan 9,8% di tingkat SMA/MA. Relasi data menunjukkan bahwa tanpa dana BOS, biaya pendidikan yang ditanggung orang tua bisa meningkat antara 25% hingga 40%, yang berpotensi meningkatkan angka putus sekolah. Meskipun demikian, kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan jumlah bantuan bagi madrasah swasta dengan jumlah siswa sedikit masih menjadi penghambat efektivitas kebijakan ini.

Eksplanasi data dari berbagai studi literatur menunjukkan bahwa dana BOS memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan operasional madrasah tanpa harus membebani orang tua secara berlebihan. Di wilayah dengan indeks kemiskinan tinggi, BOS berkontribusi

pada peningkatan APK sebesar 7,2% di tingkat SMP/MTs dan 9,8% di tingkat SMA/MA. Relasi data menunjukkan bahwa tanpa dana BOS, biaya pendidikan yang ditanggung orang tua bisa meningkat antara 25% hingga 40%, yang berpotensi meningkatkan angka putus sekolah. Meskipun demikian, kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan jumlah bantuan bagi madrasah swasta dengan jumlah siswa sedikit masih menjadi penghambat efektivitas kebijakan ini.

3. Kualitas Pendidikan dan Transformasi Digital di Daerah 3T

Peningkatan mutu madrasah diarahkan pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kesiapan menghadapi era digital. Kementerian Agama mendorong madrasah untuk melakukan transformasi digital melalui program Madrasah Digital dan BIMTEK kepemimpinan. Bukti studi kasus di beberapa madrasah menunjukkan adanya inovasi dalam metode pembelajaran berbasis teknologi. Eksplanasi data mengenai madrasah di daerah 3T (seperti di Pesisir Barat) menunjukkan bahwa kestabilan pasokan listrik merupakan faktor penentu utama keberhasilan transformasi digital. Tanpa listrik yang memadai, akses teknologi hanya terbatas pada jam-jam tertentu, sehingga menciptakan kesenjangan mutu dengan madrasah di perkotaan. Relasi data

menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan mutu di madrasah unggulan (seperti MAN IC) telah menjadi prototipe bagi madrasah lain untuk berbenah, namun keterbatasan sumber daya manusia di madrasah swasta pelosok membuat akselerasi mutu berjalan sangat lambat.

E. Kesimpulan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi kebijakan Kementerian Agama telah berhasil menciptakan fondasi sistemik untuk peningkatan tata kelola dan akses pendidikan madrasah. Program REP-MEQR terbukti menjadi katalisator utama dalam mendorong transparansi anggaran melalui e-RKAM dan pemetaan kompetensi melalui AKMI. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan akuntabilitas penggunaan dana BOS yang lebih terfokus pada program-program prioritas pengembangan mutu. Namun, terdapat disparitas yang signifikan dalam implementasi kebijakan antara madrasah negeri dan swasta, serta antara madrasah di perkotaan dengan madrasah di daerah 3T. Madrasah negeri cenderung lebih cepat beradaptasi karena dukungan anggaran negara yang stabil, sementara madrasah

swasta masih harus berjuang dengan keterbatasan finansial dan sarana prasarana.

Secara diskursif, temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menyatakan bahwa dualisme sistem pendidikan di Indonesia masih menciptakan dikotomi yang merugikan madrasah. Perbedaan perlakuan anggaran antara madrasah dan sekolah umum di masa lalu telah meninggalkan warisan ketertinggalan kualitas yang sulit dikejar hanya dengan program jangka pendek. Hasil penelitian tentang kualitas lulusan menunjukkan bahwa meskipun madrasah unggul dalam aspek moral dan keagamaan, mereka masih menghadapi tantangan besar dalam menyetarakan prestasi akademik bidang mata pelajaran umum dengan sekolah umum favorit. Hal ini mengonfirmasi pentingnya pendekatan integratif yang menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam kurikulum madrasah untuk mencetak lulusan yang lebih kompetitif.

Refleksi atas hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dan reformasi tata kelola

seringkali masih dipandang sebagai beban administratif oleh sebagian tenaga pendidik, terutama mereka yang memiliki literasi digital rendah. Implikasi dari hal ini adalah perlunya pergeseran fokus dari sekadar "pemenuhan dokumen" untuk e-RKAM atau akreditasi menuju pembangunan "budaya mutu" yang tulus di tingkat madrasah. Jika kebijakan hanya dipaksakan secara top-down tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan kompetensi guru di lapangan, maka dampak dari teknologi digital tidak akan optimal dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kebijakan afirmatif dalam PPDB juga memiliki implikasi positif dalam mewujudkan keadilan sosial, namun madrasah memerlukan dukungan tambahan berupa guru pendamping khusus dan fasilitas inklusif agar kualitas pembelajaran bagi siswa PDBK tidak terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fittoh, K. R., Ayun, A. Q., & Mustika Aji, L. A. (2023). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Journal of Education Management and Research*, 2(2), 57-64.
- Arif, S., & Hidayati, D. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Ridwan Institute*.

- Artadewi, A. M., Riyana, N. N. A. A., Nurazizah, R. P., Nursyamsi, R., & Hyangsewu, P. (2024). Perbandingan Kualitas Lulusan Sekolah Islam dan Sekolah Umum di Universitas Pendidikan Indonesia. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(12), 781-785.
- Astathi, F. (2024). Tantangan Madrasah Daerah 3T Dalam Menghadapi Masyarakat 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Farhatin. (2025). Transformasi Digital dalam Pendidikan: Akses, Kesenjangan Digital, dan Literasi Teknologi. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(6), 1494-1502.
- Fitriah, S. (2024). Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- Ikwandi, M. R. (2022). Dualisme Pendidikan Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Madrasah. *EDUSIANA Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 9(2), 105-124.
- Kementerian Agama RI. (2025). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama RI. (2024). *Rencana Strategis Kementerian Agama 2025-2029*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- Mayyora, R., Sholihah, Q., Wanusmawatie, I., & Wanto, A. H. (2025). Transformasi Digital Desa dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2).
- Nasution, & Rosyada. (2022). Evaluation of the effectiveness of MEQR in aspects of planning, implementation, and monitoring. *Education Evaluation Journal*.
- Novianti, N., Rafi, M., & Kridayani, G. (2025). Strategi dan Praktik Manajemen Madrasah yang Bermutu dan Efektif: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 1(1), 67-78.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi. (2024). *Buku Analisis APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM Tahun 2023/2024 (Termasuk Madrasah dan Sederajat)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Puspitasari, et al. (2023). Optimalisasi Dana BOS pada Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Sari, A. P., Putra, W. S., & Anjani, D. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(12).
- Sholihin, M., & Mujilahwati, S. (2020). Peranan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*.

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2020).
*Kebijakan Pendidikan: Pengantar
Untuk Memahami Kebijakan
Pendidikan dan Analisis
Kebijakan Pendidikan.*

World Bank & Kementerian Agama RI.
(2021). *Madrasah Education
Quality Reform (MEQR):
Realizing Education's Promise.*
Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam.